

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia Bogor, 2007;
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2004;
- Habib Adji, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009;
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008;
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007;
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993;
- Philippus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. XI., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011;
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Centre For Law and Good Governance Studies (CLGS), 2007;
- Philippus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997;
- Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 103
- Philippus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012;
- Wikipbn.org/jabatan/, diakses senin 25 september 2017, pukul 12.00 WIB;
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983;
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan Balai buku ikhtiar, Jakarta, 1963;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.